

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN SAMPAH DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN SADANG SERANG KOTA BANDUNG

¹Fahmi Rizki Febriansyah

²Rahman Mulyawan

³Jajang Sutisna

¹Administrasi Pemerintahan Universitas Padjadjaran Bandung

²Administrasi Pemerintahan Universitas Padjadjaran Bandung

³Administrasi Pemerintahan Universitas Padjadjaran Bandung

Email korespondensi : fahmirzkif@gmail.com

Abstract

Bandung City has a higher increase in population growth every year which can have an impact on increasing the volume of waste generated every day, such as in the Sadang Serang Village which has the highest number of community and neighborhood units among other village in Coblong District which means its has the highest population and has a large volume of waste. To overcome this, the Government implemented two waste management programs, namely the Kang PisMan and Buruan SAE. This study aims to examine and describe how the Implementation of Waste Management Policies in Sadang Serang Village, by reviewing through Van Metteer and Van Horn's theory. This study uses a descriptive method with a qualitative approach and data collection techniques through literature studies, observations, interviews, and documentation. The results show that the Waste Management Policy in Sadang Serang Village, is quite good in terms of its implementation in line with the standards and goals set, but in terms of socialization to the community it is still uneven and there are still people who are not aware of the importance of waste management, besides that resources in the form of budgets, facilities and infrastructure still do not support the implementation.

Keywords : Implementation, Management, Policy, Waste

Abstrak

Kota Bandung memiliki kenaikan pertumbuhan penduduk yang semakin tinggi setiap tahunnya di mana dapat memberikan dampak bertambah pula volume sampah yang dihasilkan setiap harinya seperti pada Kelurahan Sadang Serang yang memiliki jumlah rukun warga dan rukun tetangga terbanyak di antara Kelurahan lain di Kecamatan Coblong yang berarti Kelurahan ini memiliki jumlah populasi penduduk tertinggi dan tentunya memiliki volume sampah yang cukup besar. Untuk menanggulangnya Pemerintah Kelurahan Sadang Serang menerapkan dua program pengelolaan sampah yaitu Program Kang PisMan dan Buruan SAE. Penelitian ini bertujuan untuk untuk mengkaji dan mendeskripsikan bagaimana Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di Kelurahan Sadang Serang dengan ditinjau melalui Teori Van Metteer dan Van Horn. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif dan teknik pengumpulan data melalui studi pustaka, observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan Kebijakan Pengelolaan Sampah di Kelurahan Sadang Serang cukup baik, dalam hal pelaksanaannya sudah sejalan dengan standar dan tujuan yang ditetapkan namun dalam hal sosialisasi kepada masyarakat masih belum merata serta masih ada masyarakat yang belum sadar akan pentingnya pengelolaan sampah, selain itu sumber daya berupa anggaran serta fasilitas sarana dan prasarana masih belum mendukung implementasi kebijakan pengelolaan sampah.

Kata kunci : Implementasi, Kebijakan, Pengelolaan, Sampah

Latar Belakang/Pendahuluan

Kota Bandung merupakan Ibu Kota Provinsi Jawa Barat, di mana Kota ini memiliki kenaikan pertumbuhan penduduk yang semakin tinggi setiap tahunnya. Kondisi ini dapat memberikan dampak negatif yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat salah satunya bertambahnya volume sampah yang dihasilkan setiap harinya. Persoalan sampah di berbagai Wilayah Kota Bandung seakan tidak pernah berhenti, upaya pemerintah di tingkat Provinsi, Kota, dan Kabupaten untuk mengatasi sampah terus berlanjut, setelah longsornya TPA Leuwigajah, limbah domestik rumah tangga ini menjadi permasalahan yang menarik karena selain menimbulkan korban jiwa, kerugian material, juga berdampak buruk pada lingkungan. Kenyataannya, ratusan TPS yang ada di Kota Bandung selalu penuh dijejali limbah sampah (Fira Nursyabani, 2021). Berdasarkan rekapitulasi volume sampah, Kecamatan Coblong merupakan penghasil volume sampah tertinggi di Wilayah Kota Bandung Utara. Tingginya volume sampah Kecamatan Coblong tersebut berasal dari sampah Rumah Tangga di setiap wilayah Kelurahan yang ada di Kecamatan Coblong. Kelurahan Sadang Serang memiliki jumlah Rukun Warga dan Rukun Tetangga paling banyak diantara Kelurahan lain Di Kecamatan Coblong. Artinya Kelurahan Sadang Serang memiliki jumlah populasi penduduk yang paling tinggi dan tentunya memiliki Volume Sampah yang cukup besar. Oleh karena itu peneliti mengambil Kelurahan Sadang Serang sebagai objek penelitian.

Untuk mengurangi jumlah sampah yang dihasilkan, Pemerintah Kelurahan Sadang Serang menerapkan dua Program Pengelolaan Sampah yang

dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Bandung, yaitu Program KANG PISMAN yang diselenggarakan oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Bandung serta BURUAN SAE yang diselenggarakan oleh Dinas Pertahanan Pangan dan Pertanian (DISPANGTAN) Kota Bandung. Kedua program tersebut dianggap mampu untuk menyelesaikan permasalahan sampah rumah tangga agar tercapainya Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Rumah Tangga yang optimal serta berbasis Pemberdayaan Masyarakat yang ada di Wilayah Kelurahan Sadang Serang Kota Bandung. Program ini telah diterapkan dari tahun 2019 dan masih terus berlanjut di wilayah Kelurahan Sadang Serang hingga saat ini dan merupakan tanggung jawab dari Seksi Ekonomi dan Pembangunan Kelurahan Sadang Serang (Novianti Nurulliah, 2021).

Kang Pisman merupakan program modifikasi 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*), hanya saja lebih diperjelas teknisnya dan menggunakan unsur ke-Sundaan agar lebih akrab dan diingat oleh warga masyarakat Kota Bandung. Program ini merupakan gerakan sosialisasi upaya pengurangan, pemilahan, dan menjadikan sampah memiliki nilai ekonomis. Kang Pisman memiliki tiga fokus utama, yaitu Kang: Kurangi penggunaan semua yang terbuat dari bahan plastik dan bahan lainnya yang sulit diurai oleh alam; PIS: Pisahkan sampah organik, sampah anorganik daur ulang dan sampah sisanya; MAN: Manfaatkan dengan mengelola sampah organik dengan menggunakan metode komposter, biopori dan takakura serta untuk sampah anorganik yang bisa didaur ulang serahkan ke pengepul atau bank sampah. (<http://www.kangpisman.com> diakses 7 Desember 2021 pukul 14.45 WIB) Sedangkan Buruan Sae adalah sebuah program urban farming terintegrasi yang di galakan oleh DISPANGTAN Kota

Bandung. Kaitan Buruan Sae dengan Penelitian adalah pada sektor proses kompos program Buruan SAE ini mensupport program Kang PisMan di mana salah satu fokus utama program ini adalah warga dapat memilah jenis sampah salah satunya sampah makanan (organik) agar dapat dimanfaatkan menjadi kompos, sehingga dalam hal ini antara program Buruan SAE dan Kang PisMan saling berintegrasi dalam mengolah sampah makanan (organik) agar memiliki nilai manfaat. rumah tangga dalam pemilahan pada Program Kang Pisman. (<http://www.buruansae.bandung.go.id> diakses 7 Desember 2021 pukul 14.50 WIB)

Dalam hal ini, peneliti melakukan

penelitian tentang Implementasi Kebijakan Pengelolaan sampah yang berfokus pada Pengelolaan Sampah rumah tangga di Wilayah Kelurahan Sadang Serang Kota Bandung. Dikarenakan dalam hasil pengamatan sementara, peneliti menyimpulkan bahwa pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah yang berpedoman pada Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 9 Tahun 2018 di Wilayah Kelurahan Sadang serang yang diterapkan melalui program pengelolaan sampah dirasa kurang optimal karena memiliki jumlah volume sampah rumah tangga yang tinggi akibat populasi penduduk yang cukup besar dan memiliki faktor penyebab lain sebagai berikut:

Tabel 1 Faktor Penyebab Kurang Optimalnya Implementasi Kebijakan Pengeloaan Sampah Di Kelurahan Sadang Serang

No.	Faktor Penyebab Kurang Optimalnya Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di Wilayah Kelurahan Sadang Serang
1	Sosialisasi mengenai informasi dan komunikasi yang dilakukan Pemerintah Kelurahan Sadang Serang belum optimal terlihat dari masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam mensukseskan implementasi kebijakan.
2	Kemampuan Pemerintah Kelurahan Sadang Serang beserta Dinas pembuat Program Pengelolaan Sampah dalam mendelegasikan tugas kepada petugas pegelola ataupun pengangkut sampah belum optimal.
3	Sarana dan prasarana yang dimiliki Kelurahan Sadang Serang masih minim di mana salah satu contohnya adalah Kendaraan Operasional Pengangkut Sampah Kelurahan Sadang Serang jumlahnya terbatas.
4	Anggaran untuk pengelolaan sampah masih kurang. Pihak Kelurahan merasa anggaran yang diberikan masih belum mampu memberikan fasilitas yang cukup bagi warganya dalam pemanfaatan program pengelolaan sampah. Jumlah fasilitas yang diberikan masih kurang dalam segi kuantitas dan dalam segi kualitas banyak fasilitas yang rusak.

Sumber: Olahan Peneliti, 2022

Komunikasi merupakan faktor penting dalam kegiatan sosialisasi. Sampai saat ini sosialisasi yang dilakukan Pemerintah Kelurahan Sadang Serang bersama Dinas Pembuat Program mengenai pengelolaan sampah yang dilakukan belum tersampaikan dengan baik yang menyebabkan partisipasi masyarakat dalam mensukseskan implementasi kebijakan masih rendah. Kecenderungan Perilaku masyarakat dalam membuang sampah yang masih di

sembarang tempat dan masih membuang segala jenis sampah di satu tempat merupakan salah satu bukti masih rendahnya partisipasi masyarakat dan belum optimalnya sosialisasi program. Penelitian ini menggunakan model implementasi kebijakan publik menurut Van Metter dan Van Horn. Model implementasi kebijakan Van Metter dan Van Horn memiliki 6 variabel yang dianggap mempengaruhi implementasi kebijakan yaitu Standar dan Sasaran

Kebijakan, Sumber Daya, Komunikasi Antar Organisasi dan Penguatan Aktivitas, Karakteristik Agen Pelaksana, Kondisi Sosial, Ekonomi, Politik, dan Disposisi implementor.

Berdasarkan pemaparan yang telah dijelaskan di atas, Peneliti berupaya memberikan gambaran dari pemerintah Kelurahan Sadang Serang Kota Bandung tentang pelaksanaan Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di tingkat kewilayahan melalui program-program pengelolaan sampah. Adapun tujuan dari penelitian adalah (1) Untuk menganalisis dan mendeskripsikan Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah dalam Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Sadang Serang Kota Bandung. (2) Untuk menganalisis dan mendeskripsikan kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman (SWOT) yang dihadapi dalam Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah dalam Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Sadang Serang Kota Bandung. (3) Untuk menganalisis dan mendeskripsikan upaya yang dilakukan terhadap hasil analisis (SWOT) tersebut.

Administrasi Pemerintahan

Administrasi Pemerintahan adalah proses penjagaan (*keeping dan caring*) dan penyampaian (*forwarding dan delivering*) produk pemerintahan tertentu kepada konsumen dan memberdayakan konsumen untuk menggunakan produk tersebut dengan cara dan alat yang sesuai dengan kondisi konsumen sesegera mungkin sedemikian rupa sehingga konsumen menerimanya utuh dan sadar, dan memperoleh manfaatnya sebesar-besarnya. (Ndraha, 2010:508) Administrasi pemerintahan dimaksudkan sebagai salah satu dasar hukum bagi pemerintah, warga masyarakat, dan pihak-pihak terkait dalam upaya meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dalam hal ini terkait implementasi

kebijakan pengelolaan sampah. Administrasi pada penelitian ini mengacu pada tata laksana dalam menerapkan kebijakan pengelolaan sampah melalui Program Kang Pisman dan Buruan Sae.

Implementasi Kebijakan Publik

Implementasi merupakan langkah yang sangat penting dalam proses kebijakan. Banyak kebijakan yang baik yang mampu dibuat oleh pemerintah, tetapi kemudian ternyata tidak mempunyai pengaruh apa-apa dalam kehidupan negara tersebut, karena tidak dilaksanakan. Dalam hal ini yang perlu diperhatikan adalah persiapan implementasi, yaitu memikirkan dan menghitung secara matang berbagai kemungkinan keberhasilan dan menghitung secara matang berbagai kemungkinan keberhasilan dan kegagalan termasuk hambatan atau peluang-peluang yang ada dan kemampuan organisasi yang disertai tugas melaksanakan program. (Mulyadi, 2018:25) Kebijakan publik pada dasarnya adalah suatu keputusan yang dimaksudkan untuk mengatasi kesalahan tertentu melakukan kegiatan tertentu, atau untuk mencapai tujuan tertentu yang dilakukan oleh instansi yang mempunyai wewenang dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan Negara dan pembangunan, berlangsung dalam satu kebijakan tertentu. (Mulyadi, 2018:37) Kebijakan publik adalah sebagai tindakan yang dilakukan oleh pemerintah dan sebagai keputusan pemerintah yang mempunyai tujuan tertentu. Hasil dari analisis kebijakan publik pada umumnya sebuah rekomendasi kebijakan yang lebih lanjut atau kebijakan alternatif yang lain.

Suatu proses implementasi kebijakan itu sesungguhnya tidak hanya menyangkut perilaku badan-badan administratif yang bertanggung jawab untuk melaksanakan suatu program yang telah ditetapkan serta menimbulkan ketaatan pada diri kelompok sasaran, melainkan pula menyangkut jaringan kekuatan-kekuatan politik, ekonomi, dan

sosial yang secara langsung maupun tidak langsung dapat mempengaruhi segala pihak yang terlibat, sekalipun dalam hal ini dampak yang diharapkan ataupun yang tidak diharapkan.

Metode

Metode pada penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Metode deskriptif merupakan data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka. Data tersebut mungkin berasal dari naskah wawancara, catatan lapangan, foto, videotape, dokumen pribadi, catatan atau memo dan dokumen resmi lainnya. Semua yang dikumpulkan berkemungkinan menjadi kunci terhadap apa yang akan diteliti. Dengan demikian, laporan penelitian akan berisi kutipan-kutipan data untuk memberi gambaran penyajian laporan tersebut (Moleong, 2016:11), sedangkan Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi (Sugiyono 2017:9).

Teknik pengumpulan data didapat melalui studi pustaka, observasi, wawancara, dan dokumentasi. Instrumen berupa naskah wawancara yang telah disusun peneliti untuk setiap informan berdasarkan Teori Van Metteer dan Van Horn. Peneliti menggunakan teknik analisis data Model Miles and Hubberman dengan langkah-langkah mereduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Sugiyono, 2016:246). Peneliti juga menggunakan teknik analisis SWOT (*Strength, Weakness, Opportunity and*

Threat) yang bertujuan untuk membandingkan antara faktor eksternal peluang (*opportunities*) dan ancaman (*threats*) dengan faktor internal kekuatan (*strengths*) dan kelemahan (*weaknesses*) (Freddy Rangkuti, 2015:18-19).

Hasil Penelitian dan Pembahasan:

A. Implementasi Kebijakan

Berdasarkan Teori Van Meter dan Van Horn dijelaskan bahwa ada enam variabel yang mempengaruhi kinerja implementasi, masing-masing variabel merupakan faktor yang signifikan serta saling mempengaruhi untuk tercapainya kinerja Implementasi Kebijakan tersebut, yaitu:

Standar dan Sasaran Kebijakan

Standar yang digunakan dalam suatu kebijakan harus memiliki sasaran kebijakan di mana pada dasarnya berisi apa yang akan dicapai oleh suatu program atau kebijakan, baik yang berwujud maupun tidak, untuk jangka pendek, menengah atau pun panjang. Kejelasan dari standar dan sasaran kebijakan harus dapat dilihat secara spesifik sehingga diakhir program dapat diketahui keberhasilan atau kegagalan dari program yang dijalankan. Hasil wawancara terkait program Kang Pisman dengan Bapak LB dari Bagian Jabatan Fungsional Penyuluh Lingkungan Hidup Muda menyatakan: "*Tujuan utama dari Program Kang Pisman adalah adanya pengurangan jumlah volume sampah sesuai amanat kebijakan standar nasional ataupun daerah sebesar 30% dari jumlah volume sampah yang dihasilkan. Program ini juga digalakan dengan maksud agar masyarakat dapat menerimanya dengan mudah dengan adanya penggambaran tokoh dengan budaya Sunda dengan Jargon yang mudah diterima dan dimengerti.*" (wawancara 6 Juni 2022, pukul 10.30 WIB)

Dari hasil wawancara dapat dilihat jika Program Kang Pisman dimaksudkan agar jumlah sampah yang dihasilkan dari

setiap unit berkurang setiap harinya. Berikut ini hasil wawancara mengenai Program Buruan SAE dengan Bapak WS selaku Kepala Seksi Pengembangan Pangan Lokal Dinas Pangan dan Pertanian Kota Bandung: *“Program ini didasarkan pada Surat Edaran walikota, adapun latar belakang dari adanya program ini adalah karena Kota Bandung bukan daerah produsen sehingga ketergantungan akan pangan besar sekitar 96%. Tujuan dari program ini adalah untuk membudayakan masyarakat mandiri menciptakan pertahanan pangan minimal di level keluarga. Hubungannya program ini dengan pengelolaan sampah adalah di mana dalam Program Buruan SAE terdapat siklus mengolah sampah rumah tangga menjadi kompos yang menjadi salah satu support untuk Program Kang Pisman.”* (wawancara 13 April 2022, pukul 09.00 WIB)

Hal yang sama pula disampaikan oleh Bapak WS selaku Kepala Seksi Ekonomi Pembangunan Kecamatan Coblong Kota Bandung yang menyatakan: *“Sasaran dan Tujuan Khusus Kecamatan Coblong dalam penanganan dan pengelolaan sampah di setiap kelurahan adalah di antaranya masyarakat mengurangi penggunaan semua yang terbuat dari bahan plastik dan lainnya yang sulit terurai, masyarakat konsisten melaksanakan pemilahan sampah antara sampah organik, anorganik dan B3, setiap Rumah Tangga yang ada di wilayah kecamatan coblong dapat mengolah sampah organiknya sendiri di rumah sehingga sampah yang di buat ke TPS akan berkurang, dan berjalannya Bank Sampah yang ada di setiap kelurahan secara efektif dan efisien.”* (wawancara 14 April 2022, pukul 08.00 WIB)

Berdasarkan beberapa pernyataan yang disampaikan di atas dapat diketahui jika antara Program Kang Pisman dan

Buruan SAE memiliki latar belakang tujuan yang sama serta saling mendukung, di mana pada Program Kang Pisman tujuan utamanya adalah mengurangi jumlah sampah yang diproduksi rumah tangga, memilah dan memanfaatkan sampah sesuai jenisnya. Begitupun dengan Program Buruan SAE di mana terdapat siklus memproses sampah makanan menjadi kompos. Menurut Ibu NAS Ketua Seksi ekonomi Pembangunan dan Lingkungan Hidup Kelurahan Sadang Serang mengungkapkan: *“Pemerintah Daerah memberikan pelimpahan wewenang terkait program-program kegiatan dari para stakeholder kepada kelurahan. Salah satu wewenang kelurahan terhadap Program Kang PisMan adalah dibentuknya Bank Sampah unit disetiap unit RW dan memberikan sosialisasi sehingga warga paham apa itu bank sampah.”* (wawancara 19 April 2022, pukul 10.00 WIB) Senada dengan Bapak YS selaku Kepala Seksi Pemerintahan dan Kesejahteraan Sosial Kelurahan Sadang Serang mengungkapkan: *“Saat ini ada 2 program yang dijalankan dalam pengelolaan sampah yaitu Kang PisMan dan Buruan SAE yang didasarkan pada PerWal dengan sasaran mengajak dan mengedukasi cara pengolahan sampah yang benar kepada masyarakat dan agar ada nilai tambah bagi masyarakat itu sendiri.”* (wawancara 19 April 2022, pukul 12.30 WIB)

Dengan dimilikinya sasaran yang jelas, maka suatu organisasi akan dapat berhasil mencapai tujuannya. Adapun ukuran keberhasilan dari adanya implementasi kebijakan program Kang PisMan adalah dilihat dari menurunnya volume sampah yang ada di suatu daerah hingga 30%. Berikut adalah data rekapitulasi volume sampah TPS Kecamatan Coblong dari Januari-Juni 2021, di mana Kelurahan Sadang Serang termasuk ke dalam bagian Kecamatan Coblong.

Tabel 2 Rekapitulasi Volume Sampah TPS Kecamatan Coblong Januari – Juni 2021

No	Bulan	Volume (m ³)
1	Januari	4.606
2	Februari	4.180
3	Maret	4.580
4	April	4.396
5	Mei	4.406
6	Juni	3.841

Sumber: Data Primer Kecamatan Coblong 2021

Dari tabel di atas, kita dapat melihat implementasi program Kang PisMan di Kecamatan Coblong khususnya Kelurahan Sadang Serang sudah berjalan cukup baik, terlihat dari menurunnya *di setiap kelurahan kecamatan rata-rata kebanyakan warga kecamatan coblong sudah ditahap mengikuti jadwal pengumpulan dan pengangkutan sampah setelah sampah tersebut dipilah sebelumnya. Sampah organik biasanya diangkut oleh petugas sampah dan sampah anorganik di serahkan ke bank sampah. Tetapi banyak juga RW di beberapa kelurahan yang ada di Kecamatan Coblong yang sudah mengelola sampah organik menjadi kompos, biopori dll. Sampah anorganik dijadikan kerajinan daur ulang yang bermanfaat.*" (wawancara 14 April 2022, pukul 08.00 WIB) Ibu NAS selaku Kepala Seksi Ekonomi Pembangunan Kelurahan Sadang Serang mengungkapkan: *"Sampai tahun ini, kita sudah sampai ada 14 pengelola sampah walaupun ada perbedaan metode dan sosialisasi tapi sudah terlaksana. Kawasan Bebas Sampah (KBS) sudah bertahap membaik dan ada di beberapa titik, para warga sudah mulai sadar akan manfaat yang dirasakan dengan menjalankan 2 program ini. Total pencapaian hingga saat ini 14 dari 21 RW yang ada di Kelurahan Sadang Serang."* (wawancara 19 April 2022, pukul 10.00 WIB)

Berdasarkan data dan pernyataan dari informan di atas dapat dikatakan jika implementasi kebijakan program pengelolaan sampah Kang PisMan dan Buruan SAE sudah dikatakan berjalan

jumlah sampai hingga periode Juni. Hasil wawancara dengan Bapak WS selaku Kepala Seksi Ekonomi Pembangunan Kecamatan Coblong menyatakan: *"Pencapaian ukuran dan tujuan kebijakan coblong berbeda. Tapi jika ditarik cukup baik.*

Sumber Daya

Dalam hal implementasi suatu kebijakan, faktor sumber daya sangat menentukan keberhasilan implementasi tersebut. Sumber daya merujuk kepada dukungan manusia, finansial, ataupun sarana prasarana dalam melaksanakan program suatu kebijakan. Manusia merupakan tokoh penggerak dalam melakukan implementasi suatu program. Kompetensi dan juga ide yang dimiliki akan menjadi faktor penentu keberhasilan suatu program. Dalam konteks implementasi kebijakan Kang PisMan dan Buruan SAE, peran DLH dan DISPANGTAN dalam menerjunkan petugas yang kompeten menentukan keberhasilan pelaksanaan program untuk setiap Kecamatan dan Kelurahan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak LB dari Bagian Jabatan Fungsional Penyuluh Lingkungan Hidup Muda menyatakan: *"Petugas yang ditugaskan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung merupakan orang-orang yang berkualitas dan berpengalaman dalam bidang pengelolaan sampah contohnya composing. Mereka juga memiliki latar belakang pendidikan yang tinggi dari S1 sampai S3."* (wawancara 6 Juni 2022, pukul 10.30 WIB) Senada dengan pernyataan Kepala Seksi Pengembangan Pangan Lokal

Dinas Pangan dan Pertahanan Kota Bandung menyebutkan, *“Sebelum kami mengirim petugas ke lapangan, mereka harus paham terlebih dahulu secara aturan maupun teknis sebelum melakukan pendampingan sehingga apa yang harus disosialisasikan sama kepada masyarakat.”* (wawancara 13 April 2022, pukul 09.00 WIB)

Berdasarkan pemaparan di atas dapat terlihat jika dalam upaya mensukseskan Program Kang PisMan dan Buruan SAE, Dinas terkait mempersiapkan para tenaga kerjanya untuk memiliki kompetensi yang baik dan dibutuhkan dalam melakukan pendampingan. Namun, di sisi lain sumber daya manusia juga menjadi penghambat tersendiri bagi Dinas terkait dari segi jumlah tenaga yang ada, seperti yang disampaikan Bapak LB dari Bagian Jabatan Fungsional Penyuluh Lingkungan Hidup Muda menyatakan: *“Petugas kami ditugaskan adalah orang-orang yang berkualitas dan berpengalaman, namun di lapangan kita terkendala dengan jumlah petugas yang hanya berjumlah 30 orang tetapi harus menangani 151 kelurahan.”* (wawancara 6 Juni 2022, pukul 10.30 WIB) Begitu pun dengan pernyataan Bapak WS selaku Kepala Seksi Pengembangan Pangan Lokal Dinas Pangan dan Pertahanan Kota Bandung menyatakan: *“Terkait sumber daya kita terbatas dengan tenaga penyuluh dan pendamping di mana tiap kecamatan hanya ada dua orang pendamping sedangkan satu kecamatan bisa sampai lebih dari 10 kelurahan.”* (wawancara 13 April 2022, pukul 09.00 WIB)

Selain SDM, Keuangan merupakan faktor fundamental dalam menjalankan suatu program. Dalam mensukseskan program ini, pemerintah memberikan dukungan finansial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), namun di lapangan masalah keuangan pun menjadi sebuah kendala dikarenakan dukungan finansial yang

diberikan pemerintah setelah sampai ke lapangan bukan berupa uang namun asset. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak LB dari Bagian Jabatan Fungsional Penyuluh Lingkungan Hidup Muda menyatakan: *“Dana untuk melaksanakan program ini berasal dari APBD, namun pemerintah memiliki keuangan yang terbatas. Dana pun menjadi kendala di mana proses penyetujuan dana khususnya untuk belanja modal sedikit sulit dan harus melewati serangkaian monitoring bukti pengadaan dan penggunaan serta penyimpanan.”* (wawancara 6 Juni 2022, pukul 10.30 WIB) Senada dengan pernyataan Bapak WS Kepala Seksi Pengembangan Pangan Lokal Dinas Pangan dan Pertahanan Kota Bandung menyebutkan, *“Untuk menjalankan program ini, kami memiliki dana yang bersumber dari APBD rutin kota Bandung namun jumlahnya terbatas sehingga kita juga terbatas mengenai anggaran penyediaan sarana dan prasarana.”* (wawancara 13 April 2022, pukul 09.00 WIB)

Dari hasil wawancara tersebut dapat diketahui jika dilihat dari segi sumber daya, faktor yang menjadi penghambat dalam implementasi program ini adalah keterbatasan keuangan (anggaran). Hal ini diperjelas juga oleh pernyataan Ibu NAS Ketua Seksi Ekonomi Pembangunan Kelurahan Sadang Serang yang menyatakan: *“Anggaran dana dari pemerintah berupa asset pinjam pakai dari PemKot sehingga menjadi tanggung jawab RW jadi untuk pemakaian, pemeliharaan, dan penyimpanan menjadi tanggung jawab RW.”* (wawancara 19 April 2022, pukul 10.00 WIB) Hal yang sama dikatakan oleh Bapak ED selaku ketua RW 03 yang merupakan Ketua Forum RW menyatakan: *“Bantuan dana dari pemerintah ada berupa asset, jika kita kekurangan sesuatu kita dapat membuat pengajuan tapi pencairannya kadang lama bisa jadi tahun berikutnya sehingga kebanyakan dana*

adalah swadaya dari warga.” (wawancara 7 Juni 2022, pukul 11.00 WIB) Senada dengan pernyataan Ibu NI Ketua RW 09 yang juga merupakan Ketua Buruan SAE yang mengatakan: *“Untuk bantuan dana dari pemerintah ada berupa asset barang seperti media tanam, ada juga stimulan hadiah dari kegiatan yang dilakukan terkait program namun tetap berupa barang.”* (wawancara 8 Juni 2022, pukul 10.00 WIB)

Dari beberapa pernyataan di atas dapat diketahui jika pemerintah memberikan dukungan dana yang bersumber dari APBD yang dikomparasikan ke dalam bentuk asset yang dapat menunjang berjalannya implementasi program Kang PisMan dan Buruan SAE. Sarana dan prasarana merupakan penunjang aktivitas dalam implementasi kebijakan program pengelolaan sampah. Sarana dan prasarana ini yang akan digunakan SDM dalam melakukan aktivitasnya. Ketersediaan sarana dan prasarana yang baik dan memadai mampu membantu SDM tersebut melakukan tugas yang diembannya.

Kondisi sarana dan prasarana di lapangan banyak memiliki kendala seperti yang diungkapkan Ibu NAS Kepala Seksi Ekonomi Pembangunan Kelurahan Sadang Serang mengatakan: *“Untuk melakukan program pengelolaan sampah, setiap unit wilayah dibekali beberapa sarana dan prasarana seperti triseda, roda sampah, ember tutup, bara terawang, dan loseda. Namun setelah melakukan pengecekan 40% dari sarana itu (triseda) sudah tidak dalam kondisi baik (rusak dan tidak jalan).”* (wawancara 19 April 2022, pukul 10.00 WIB) Begitupun dengan pernyataan yang disampaikan oleh Bapak ED ketua RW 03 yang merupakan Ketua Forum RW menyebutkan: *“Warga sudah difasilitasi dengan sarana dan prasarana seperti bata terawang, composer, loseda, roda, ember tamping, dan bank sampah. Namun kenyataan di lapangan ternyata belum mencukupi karena kita masih membutuhkan alat untuk mencacah sampah menjadi lebih*

kecil agar mudah dalam membuat pupuk dan kita juga masih kekurangan jumlah ember pengangkut di mana dalam satu minggu kita harus mengolah kurang lebih 25 kg sampah.” (wawancara 7 Juni 2022, pukul 11.00 WIB) Senada dengan pernyataan Ibu NI Ketua RW 09 yang merupakan Ketua Buruan SAE mengungkapkan: *“Sebenarnya sarana dan prasarana yang tersedia sudah cukup, namun kita terkendala dengan lahan karena merupakan padat penduduk sehingga tidak memiliki lapangan dalam mengolah atau memanfaatkan sampah.”* (wawancara 8 Juni 2022, pukul 10.00 WIB)

Berdasarkan beberapa pernyataan di atas, ketersediaan sarana dan prasarana dapat menjadi penentu keberhasilan implementasi kebijakan. Sarana dan prasarana yang sudah disediakan pemerintah daerah sudah cukup baik hanya saja masih memerlukan pemeliharaan agar memiliki umur ekonomis lebih lama sehingga manfaat yang dapat dipakai cukup panjang.

Komunikasi Antar Organisasi dan Penguatan Aktivitas

Komunikasi merupakan faktor yang sangat penting dan menentukan keberhasilan implementasi suatu kebijakan, karena komunikasi berkaitan dengan penyampaian informasi, ide, dan peraturan lainnya melalui sarana tertentu kepada pihak yang berhak menerimanya. Komunikasi akan ditetapkan sebagai acuan suatu mekanisme prosedur yang direncanakan agar dapat mencapai sasaran dan tujuan program. Dalam suatu organisasi, komunikasi dapat menjadi suatu proses yang sangat kompleks dan pelik, di mana komunikasi yang akurat harus dapat dimengerti secara cermat oleh para pelaksana kebijakan. Dalam konteks komunikasi, perbedaan sumber informasi dapat menghasilkan perbedaan interpretasi, sehingga keterampilan dalam hal berkomunikasi menjadi sesuatu yang sangat

penting yang dapat menjamin suatu informasi telah disampaikan dengan baik. Dalam konteks mengkomunikasikan kebijakan tentang pengelolaan sampah, secara internal lingkup Dinas berupaya melakukan komunikasi yang intens pada semua para bawahan yang terlibat dalam sukseksi sebuah program serta mengupayakan agar pelaksanaannya sesuai yang diharapkan. Berikut hasil wawancara dengan Bapak LB dari Bagian Jabatan Fungsional Penyuluh Lingkungan Hidup Muda menyatakan: *“Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya kepala Dinas selalu melakukan komunikasi baik, baik perintah maupun disposisi kepada bawahannya maupun ke kelurahan. Melalui kegiatan FGD yang dilakukan secara berkala pihak Dinas berupaya memonitoring dan mengevaluasi progress dari kebijakan program Kang Pisman.”* (wawancara 6 Juni 2022, pukul 10.30 WIB) Senada dengan pernyataan Kepala Seksi Pengembangan Pangan Lokal Dinas Pangan dan Pertahanan Kota Bandung menyebutkan: *“Selama ini komunikasi berjalan dengan baik dan selalu di maintenance, terlebih untuk kolaborasi karena penting dalam mendukung program, sebab kita tidak bisa mengandalkan dari SDM yang ada yang jumlahnya sangat terbatas. Bentuk komunikasi itu contohnya adalah adanya WA group dengan para pendamping dan jika akan melakukan monitoring pasti akan dikomunikasikan terlebih dahulu dengan Kepala Seksi Ekonomi Pembangunan begitupun sebaliknya.”* (wawancara 13 April 2022, pukul 09.00 WIB)

Kepala Seksi Ekonomi Pembangunan Kecamatan Coblong Kota Bandung Bapak WS pun mengungkapkan hal yang sama yaitu: *“Komunikasi yang terjalin antar berbagai organisasi maupun stakeholder sudah baik karena semua pihak sudah memiliki visi, misi, dan tujuan yang sama. Dalam menyampaikan hasil monitoring program, Kasi Ekbang kelurahan akan berkoordinasi kepada Kasi*

Ekbang Kecamatan dan melapor kepada Lurah. Kasi Ekbang Kecamatan pun berkoordinasi dengan Dinas atau pihak terkait dan melapor kepada Camat dan Walikota Bandung (pemberitahuan).” (wawancara 14 April 2022, pukul 08.00 WIB) Sama dengan Bapak WS Kepala Seksi Pemerintahan dan Kesejahteraan Sosial Kelurahan Sadang Serang mengungkapkan: *“Komunikasi yang terjalin antar berbagai pihak sudah lancar. Pemerintah Kelurahan selalu melibatkan para RW dalam rapat atau diklat dan pelatihan terkait program pengelolaan sampah.”* (wawancara 19 April 2022, pukul 12.30 WIB)

Dari pihak warga pun yang diwakili Bapak ED selaku Ketua Forum RW mengungkapkan: *“Selama ini komunikasi berjalan dengan lancar karena birokrasi yang jelas, walaupun sistem birokrasi agak sulit diterapkan dalam masyarakat sehingga kita harus melihat tingkat urgensinya.”* (wawancara 7 Juni 2022, pukul 11.00 WIB) Senada dengan pernyataan Ibu NI selaku Ketua Buruan SAE yang merupakan Ketua RW 09 menyatakan: *“Hingga saat ini komunikasi terhubung baik dengan Kelurahan. Masyarakat memiliki latar belakang yang berbeda sehingga harus menggunakan komunikasi yang berbeda juga jadi agak sulit jika sosialisasi harus dilakukan langsung oleh pihak Kelurahan jadi harus ada pendekatan terlebih dahulu kepada warganya.”* (wawancara 8 Juni 2022, pukul 10.00 WIB)

Berdasarkan beberapa pernyataan di atas, dapat diketahui jika komunikasi merupakan faktor fundamental suatu implementasi kebijakan dapat terlaksana. Tanpa komunikasi hampir tidak mungkin suatu implementasi kebijakan dapat tersampaikan dengan baik. Dalam penelitian ini komunikasi yang terjalin baik antar Dinas ataupun dengan para stakeholder dan masyarakat sudah terjalin dengan cukup baik.

Karakteristik Agen Pelaksana

Dalam mengimplementasikan kebijakan, suatu kebijakan berjalan baik atau tidaknya tertuju pada agen pelaksana. Agen pelaksana meliputi organisasi formal maupun informal yang akan terlibat pengimplementasian kebijakan akan sangat banyak dipengaruhi oleh ciri-ciri yang tepat serta sesuai dengan para agen pelaksananya. Dalam hal menentukan agen pelaksana, cakupan atau luas wilayah implementasi kebijakan perlu diperhitungkan. Semakin luas cakupan implementasi kebijakan, maka seharusnya semakin besar pula agen yang dilibatkan. Karakteristik agen pelaksana, merujuk kepada seberapa besar daya dukung struktur organisasi, nilai-nilai yang berkembang, hubungan dan komunikasi yang terjadi di internal birokrasi. Dalam pelaksanaan kebijakan ini dukungan dari masyarakat sudah baik namun belum optimal sehingga pelaksanaan kebijakan Program Kang Pisman belum maksimal di daerah tertentu. Karakteristik agen pelaksana harus dapat melakukan persuasi kepada masyarakat sehingga mampu menggerakkan masyarakat menjalankan program kebijakan yang disosialisasikannya. Berikut hasil wawancara dengan Bapak LB dari Bagian Jabatan Fungsional Penyuluh Lingkungan Hidup Muda menyatakan: *“Agen pelaksana yang dilibatkan merupakan orang-orang yang sudah berpengalaman di bidang pengelolaan sampah namun kita terhambat dari jumlah sumber daya manusia tersebut. Selain itu pelaksanaan pengelolaan sampah melalui Program Kang Pisman sudah berjalan dengan baik, namun dilapangan terdapat kondisi di mana masyarakat mampu melaksanakan program dengan baik ketika ada pendampingan dari agen pelaksana, akan tetapi setelah dilepaskan oleh agen pelaksana masyarakat kebingungan lagi sehingga program akan kembali lagi ke nol.”* (wawancara 6 Juni 2022, pukul 10.30 WIB) Senada dengan

Kepala Seksi Pengembangan Pangan Lokal Dinas Pangan dan Pertanian Kota Bandung membahas mengenai Agen Pelaksana Program Buruan SAE, beliau menyatakan: *“Dari sisi kualitas, secara internal agen pelaksana harus paham segala bentuk aturan maupun teknis sebelum pendampingan sehingga pola yang disampaikan kepada masyarakat akan sama, namun dari segi kuantitas kita kekurangan jumlah pendamping dimana dalam satu kecamatan hanya ada dua pendamping.”* (wawancara 13 April 2022, pukul 09.00 WIB)

Pernyataan sama diungkapkan oleh Bapak ED Ketua RW 03 yang merupakan Ketua Forum RW menyatakan: *“Kita memiliki agen pelaksana yang proaktif yang selalu mensosialisasikan program dalam setiap kesempatan. Ada 6 sampai 8 orang agen pelaksana di RW ini yang berasal dari Bank Sampah atau dari Buruan SAE namun melihat jumlah RT dan penduduk disini dirasa jumlah agen pelaksana masih kurang.”* (wawancara 7 Juni 2022, pukul 11.00 WIB) Senada dengan Ibu NI Ketua RW 09 yang merupakan Ketua Buruan SAE mengungkapkan: *“Ada 7 orang agen pelaksana yang aktif memberikan pembinaan, namun mereka terkadang terbatas dalam waktu sehingga dengan jumlah warga di RW ini dirasakan jumlah tersebut masih belum memenuhi.”* (wawancara 8 Juni 2022, pukul 10.00 WIB)

Berdasarkan beberapa pernyataan di atas, kualitas dari agen pelaksana yang dilibatkan sudah memiliki kompetensi yang baik, namun dari segi jumlah masih kurang memadai karena jumlah warga di setiap RW dikelurahan Sadang Serang cukup banyak.

Kondisi Lingkungan Sosial, Ekonomi, dan Politik

Hal lain yang harus diperhatikan guna menilai kinerja dari suatu implementasi kebijakan dalam persepektif yang dirumuskan oleh Van Metter dan Van

Horn adalah sejauh mana lingkungan eksternal turut mendorong keberhasilan kebijakan yang telah ditetapkan. Lingkungan sosial, ekonomi, dan politik yang tidak kondusif dapat menjadi penyebab dari kegagalan kinerja implementasi kebijakan. Oleh karena itu, upaya untuk mengimplementasikan kebijakan harus pula memperhatikan kekondusifan kondisi lingkungan eksternal. Faktor sosial berkenaan dengan hubungan antar masyarakat ataupun dengan lingkungannya. Dukungan ekonomi menggambarkan kemampuan masyarakat dalam memenuhi hidupnya. Faktor politik menunjukkan di mana elit politik yang menentukan kebijakan memiliki kehendak untuk berpihak pada kepentingan masyarakat.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak LB dari Bagian Jabatan Fungsional Penyuluh Lingkungan Hidup Muda menyatakan: *“Dalam melaksanakan program kebijakan Kang Pisman terdapat keterlibatan dari pihak luar seperti masyarakat tentunya, lalu ada dari lembaga swadaya masyarakat, usaha industri, akademisi, jurnalis, dan media masa. Dengan adanya kolaborasi dari semua pihak program ini dapat meningkatkan taraf sosial seperti yang kita ketahui tidak semua orang terbiasa hidup berdampingan dengan TPS, melalui program ini TPS yang dalam frame semua orang jorok dan bau berubah menjadi terkoordinir karena adanya pemilahan sampah. Di bidang ekonomi adanya pembukaan lapangan pekerjaan melalui pemisahan sampah masyarakat dapat menjual sampah yang sudah dipisahkan pada bank sampah atau bandar. Ada juga lapangan pekerjaan baru dari pengolahan sampah organik menjadi pupuk atau makanan pakan dan sampah anorganik menjadi suatu barang yang dibutuhkan oleh dunia usaha. Pada bidang politik setelah adanya program ini terdapat rasa aman di bidang pemerintahan karena sampah*

terkelola dengan baik sehingga image pemerintahan di mata masyarakat menjadi lebih baik.” (wawancara 6 Juni 2022, pukul 10.30 WIB) Senada dengan yang disampaikan oleh Kepala Seksi Pengembangan Pangan Lokal Dinas Pangan dan Pertanian Kota Bandung menyatakan: *“Dari sisi ekonomi, program Buruan SAE dapat dipandang dari dua sisi yaitu menambah penghasilan atau mengurangi biaya. Tambahan penghasilan bisa didapatkan dari sisi penjualan sayur atau kompos. Dari segi mengurangi biaya minimal untuk mengkonsumsi sayuran atau memberi tanaman pupuk tidak perlu lagi membeli dari pihak luar.”* (wawancara 13 April 2022, pukul 09.00 WIB)

Ketua Seksi Ekonomi Pembangunan dan Lingkungan Hidup Kelurahan Sadang Serang Ibu NAS mengungkapkan: *“Penduduk di Kelurahan Sadang Serang memiliki latar belakang yang berbeda baik dari segi sosial, ekonomi, ataupun politik. Hal itu menjadikan kita sebagai pemerintah dalam mensosialisasikan program kebijakan harus melakukan pendekatan yang berbeda, namun perbedaan itu semua tidak menjadi hambatan dalam menjalankan program kebijakan pengelolaan sampah. Kondisi sosial masyarakat yang masih kental dengan gotong royong menjadikan program ini dapat berjalan cukup baik.”* (wawancara 19 April 2022, pukul 10.00 WIB) Sama dengan pernyataan dari Bapak YS Ketua Seksi Pemerintahan dan Kesejahteraan Sosial Kelurahan Sadang Serang: *“Penduduk di Kelurahan Sadang Serang memiliki kondisi sosial, ekonomi, dan politik yang berbeda-beda dan beragam, namun dalam menjalankan program kebijakan perbedaan tersebut tidak menjadi kendala dan cenderung stabil. Dari segi sosial warga saling membantu menjalankan program pengelolaan sampah. Di sisi ekonomi, perbedaan tingkat ekonomi menjadikan program dapat berjalan karena warga dengan tingkat ekonomi tinggi mau*

membantu melakukan swadaya dalam mengolah sampah. Di sisi politik, ada unsur partai politik yang mendukung program ini.” (wawancara 19 April 2022, pukul 12.30 WIB)

Berdasarkan pernyataan di atas dapat diketahui jika kondisi sosial, ekonomi, dan politik dapat mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan. Dukungan dan partisipasi dari masyarakat memungkinkan implementasi menjadi lebih mudah, dukungan dari pemerintah berupa finansial ataupun berupa program untuk kepentingan rakyat dapat membantu keberhasilan suatu implementasi program kebijakan.

Disposisi Implementor

Disposisi atau sikap pelaksana dalam program pengelolaan sampah merupakan suatu faktor penting dalam pelaksanaan kebijakan. Sikap para pelaksana dalam program ini apabila mempunyai keinginan untuk melaksanakan program, maka sudah tentu pelaksanaan program akan efektif. Hal ini menandakan adanya dukungan yang kuat dan keinginan yang besar untuk melaksanakan kebijakan sesuai apa yang menjadi keputusan awal. Jika pandangan dan sikap para pelaksana berbeda dengan tujuan yang akan dicapai maka proses pelaksanaan akan semakin jauh dari harapan untuk mensukseskannya. Kurangnya dalam intensitas disposisi ini, akan mengakibatkan gagalnya pelaksanaan kebijakan. Adapun hasil wawancara dengan Bapak LB dari Bagian Jabatan Fungsional Penyuluh Lingkungan Hidup Muda menyatakan: *“Pada dasarnya bahwa semua komponen baik pimpinan pegawai/tenaga kerja mendukung sepenuhnya terhadap implementasi kebijakan pengelolaan persampahan. Pengelolaan persampahan merupakan kebijakan yang dijadikan prioritas utama. Hanya saja dalam pelaksanaannya sikap komitmen dari masyarakat semua memiliki komitmen yang tinggi, masyarakat akan berkomitmen*

ketika ada pendampingan dari pihak Dinas, namun setelah tidak ada pendampingan komitmen pelaksanaan pengelolaan sampah kembali tidak ada, masyarakat kembali tidak memisahkan dan memilih sampah.” (wawancara 6 Juni 2022, pukul 10.30 WIB)

Begitu pun dengan pernyataan Kepala Seksi Pengembangan Pangan Lokal Dinas Pangan dan Pertanian Kota Bandung menyatakan: *“Pada dasarnya pelaksana sudah dipersiapkan dari segi aturan, SOP, dan teknis pengelolaan sehingga mereka totalitas. Mereka berperan besar dalam banyak hal dan dikarenakan masyarakat yang heterogen para pelaksana harus mensosialisasikan dengan lebih intens dan detail dalam memberikan informasi.”* (wawancara 13 April 2022, pukul 09.00 WIB) Senada dengan pernyataan Ibu NAS Ketua Seksi Ekonomi Pembangunan dan Lingkungan Hidup Kelurahan Sadang Serang menyebutkan: *“Sikap Pelaksana dalam menjalankan program cukup berpengaruh, mampu mengedukasi warga menjadi lebih paham mengenai manfaat dan cara mengelola sampah sehingga warga menjadi lebih terbuka terhadap pelaksanaan program.”* (wawancara 19 April 2022, pukul 10.00 WIB)

Dari pernyataan di atas dapat diketahui jika sikap pelaksana penting dalam mencapai tujuan kebijakan. Pelaksana yang memiliki sikap persuasif ataupun memotivasi warga dalam pelaksanaan program akan membuat warga masyarakat dengan sukarela mau melakukan kebijakan program tersebut sampai akhirnya mencapai tujuan yang ditetapkan.

B. Analisis SWOT

Analisis SWOT digunakan dalam pembahasan hasil penelitian ini untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi pendukung dan penghambat dalam implementasi kebijakan pengelolaan sampah baik faktor internal maupun eksternal. Dalam penelitian ini yang menjadi faktor internal diklasifikasikan

pada kekuatan (*strengths*) dan kelemahan (*weaknesses*), sedangkan peluang (*opportunities*) dan ancaman (*threats*) diklasifikasikan ke dalam faktor eksternal. Strengths adalah faktor internal dan positif dari organisasi. Dalam implementasi kebijakan program pengelolaan sampah pemerintah daerah memiliki regulasi yang jelas yaitu Perda Nomor 9 Tahun 2018 tentang Kebijakan Pengelolaan Sampah yang diperjelas melalui Perwal ataupun Surat Edaran Walikota. Adanya kesesuaian antara visi dan misi pemerintahan dengan kondisi masyarakat menjadikan kekuatan dalam mengimplementasikan program kebijakan. Program ini juga memiliki standard dan sasaran yang jelas yaitu mengurangi dan lebih memanfaatkan sampah (*zero waste*). Sumber daya yang berperan sebagai agen pelaksana sudah dibekali standar yang jelas sehingga mereka memiliki kompetensi dan motivasi yang kuat untuk mensosialisasikan program ini, mereka pun dibekali oleh sarana fasilitas dalam menjalankannya sehingga dapat mencapai tujuan yang ditetapkan. Komunikasi antar implementor pun terjalin dengan baik, sehingga segala bentuk kendala dapat dihadapi dan dicari solusinya dengan cepat. Pemerintah daerah menganggarkan dana untuk pengalokasian program dari APBDnya, selain itu juga tersedia sumber dana alternatif yang berasal dari swadaya masyarakat maupun dari lembaga *non government* yang berpotensi dalam implementasi kebijakan program agar terus berjalan dengan konsisten.

Weaknesses merupakan faktor internal yang bersifat negatif yang dapat menghambat kekuatan organisasi dan dapat menjadi kendala. Adapun kelemahan yang menjadi kendala dalam implementasi program pengelolaan sampah adalah berkaitan dengan sosialisasi yang belum tersampaikan secara merata, hal ini dikarenakan adanya keterbatasan dalam jumlah sumber daya manusia yang menjadi agen pelaksana. Faktor lain yang menjadi

kelemahan adalah keterbatasan anggaran dalam implementasi program. Di sisi lain ada juga kendala dari ketersediaan lahan kosong untuk dijadikan TPS karena ada keberatan dari warga setempat jika lingkungan tempat tinggalnya berdekatan dengan TPS. Hal lain yang menjadi kelemahan dalam implementasi program adalah terbatasnya usaha industri yang akan menyerap atau menggunakan hasil akhir dari produk pemanfaatan sampah yang sudah diolah.

Opportunities merupakan faktor eksternal yang dapat berkontribusi pada kesuksesan program organisasi. Adanya dukungan penuh dari pihak pemerintah terhadap implementasi kebijakan program pengelolaan sampah menjadi salah satu peluang tujuan dari program dapat tercapai. Bentuk dukungan dari pemerintah di sini dapat berupa bantuan dana (anggaran) yang berasal dari APBD ataupun dukungan lainnya berupa kejelasan SOP dalam mensosialisasikan program. Bentuk dukungan lain berasal dari masyarakat, dalam hal ini adanya keinginan dan sambutan baik dari masyarakat pada program ini menjadikannya suatu peluang suksesnya program. Hal lain yang dapat menjadikan implementasi program ini berhasil salah satunya dari kebiasaan gotong royong warga setempat. Di luar dari itu dukungan dari pihak luar (swasta/ lembaga nonformal) terhadap implementasi program cukup baik, banyak berbagai pihak yang ikut berkontribusi dalam implementasi program berupa bantuan dana, tenaga, atau pun pemikiran. Selain itu juga pemerintah (pihak Kelurahan) sudah melakukan kerjasama dengan pihak swasta dalam bentuk CSR. Dalam menyerap hasil pemanfaatan sampah, sudah ada beberapa usaha industri yang bersedia menggunakan hasil olahan yang dihasilkan warga. Di sisi lain, masyarakat sudah berpartisipasi aktif dalam pengumpulan sampah dari rumah tangga ke Bank Sampah. Selain itu, program pengelolaan sampah ini

berpeluang memberikan penghasilan tambahan bagi warga setempat. Dalam penyebarluasan informasi program, sudah ada kerjasama dengan media masa untuk melakukan pemasaran kegiatan.

Threats merupakan faktor eksternal yang bersifat negatif yang cenderung sulit untuk dikendalikan. Organisasi harus mempertimbangkan hal ini agar dapat menempatkan rencana darurat dalam menangani masalah yang muncul. Banyaknya jumlah masyarakat Kelurahan Sadang Serang yang tidak seimbang dengan jumlah agen pelaksana menjadi masalah tersendiri, di mana agar sosialisasi program kebijakan pengelolaan sampah berjalan dengan baik banyak dari agen pelaksana yang bekerja pada hari liburnya. Rendahnya kesadaran dan pemahaman masyarakat akan program pun menjadi kendala, ada beberapa masyarakat yang masih tetap membuang sampah sembarangan ataupun masih mencampur/ tidak memilah sampah sesuai jenis. Selain itu kemandirian dan konsistensi masyarakat dalam menjalankan program masih kurang, di mana banyak masyarakat yang sudah paham menjalankan program ketika ada pendampingan namun ketika tidak didampingi kembali oleh petugas masyarakat kembali lalai dalam menerapkan program sehingga program tidak bisa berkelanjutan. Di sisi lain, program ini tidak ayal dijadikan ajang usaha oleh sebagian kecil masyarakat sehingga terkadang mereka mempertimbangkan untung dan rugi ketika akan menjalankan program kebijakan. Selain yang dipaparkan di atas, kendala lain datang dari pihak petugas sampah di mana jadwal pengambilan sampah terkadang berubah-ubah tidak sesuai dengan ketentuan awal. Ada juga beberapa petugas yang malah mencampur kembali sampah yang sudah dipilah warga dengan alasan lebih efektif karena tidak banyak katung wadah yang harus diangkut. Hal tersebut dikarenakan ada beberapa wilayah yang mengambil petugas sampah dari pihak lain

(swasta) bukan dari warga sekitar sehingga pemahaman dan kepeduliannya akan program kurang baik dan tidak sejalan.

C. Strategi Analisis SWOT

Berdasarkan pemaparan mengenai analisis SWOT, dapat dihasilkan suatu strategi sebagai upaya dalam menyelesaikan segala permasalahan yang dapat menjadi kendala dalam implementasi kebijakan program pengelolaan sampah. Untuk itu, peneliti menyusun beberapa strategi dengan mempertimbangkan faktor-faktor sebagai berikut:

1. Strategi SO (*Strength-Opportunities*), ciptakan strategi dengan menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang yaitu dengan:
 - a. Mengoptimalkan sinergitas visi dan misi dalam dukungan politik
 - b. Mengoptimalkan dukungan para *stakeholder*
 - c. Memasifkan sosialisasi terkait implementasi program
2. Strategi ST (*Strengths-Threats*), ciptakan strategi dengan menggunakan kekuatan untuk mengatasi ancaman yaitu dengan:
 - a. Memaksimalkan pemberdayaan masyarakat terkait visi dan misi yang akan dicapai guna meningkatkan kesadaran dan konsistensi masyarakat dalam mengelola sampah
 - b. Mengkoordinir produk akhir dari pemanfaatan sampah
 - c. Membentuk wadah komunikasi guna mempermudah sosialisasi
 - d. Bekerjasama dengan pihak industri dalam pendistribusian produk olahan
 - e. Menjalin kerja sama dengan pihak media untuk menyebarluaskan informasi
3. Strategi WO (*Weaknesses-Opportunities*), ciptakan strategi yang mampu meminimalkan kelemahan dan memanfaatkan peluang yaitu dengan:

- a. Melakukan kerjasama dengan beberapa Perguruan Tinggi terkait rekrutmen pegawai sukarelawan
 - b. Mengalokasikan anggaran sesuai dengan perda yang ditetapkan
 - c. Meningkatkan partisipasi masyarakat guna mengatasi keterbatasan sumber daya manusia dan sarana prasarana
4. Strategi WT (*Weaknesses-Threats*), ciptakan strategi yang mampu meminimalkan kelemahan dan menghindari ancaman yaitu dengan:
- a. Perlu adanya pengelolaan dan aturan (SOP) yang jelas kepada masyarakat
 - b. Meningkatkan kapasitas sumber daya dalam upaya mensukseskan program kebijakan dengan merubah persepsi, sikap, dan perilaku masyarakat dalam mengelola sampah
- warga sekitar.
- b. Sumber daya dari segi SDM sudah berkualitas, namun dari segi finansial dan fasilitas masih belum optimal. Anggaran dianggap masih belum cukup dan fasilitas masih belum optimal dalam mendukung kebijakan.
 - c. Komunikasi antar organisasi dan penguatan aktivitas dalam aspek ini sudah berjalan dengan baik mulai dari pihak Kelurahan maupun Dinas terkait, namun dalam hal sosialisasi kepada masyarakat masih belum optimal, informasi belum tersampaikan secara merata.
 - d. Karakteristik agen pelaksana sudah sangat persuasif mendukung jalannya kebijakan ini, namun dari segi jumlah masih belum cukup untuk menangani jumlah warga yang lebih banyak.
 - e. Kondisi lingkungan sosial, ekonomi, dan politik cukup memberi pengaruh dalam pelaksanaan kebijakan ini.
 - f. Disposisi para pelaksana dalam kebijakan ini memiliki dukungan, komitmen, dan tanggung jawab yang tinggi.
2. Analisis mengenai Kekuatan, Kelemahan, Peluang, dan Ancaman dinilai seimbang antara faktor pendukung dan penghambat baik bersifat internal maupun eksternal sehingga Kebijakan Pengelolaan Sampah dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Sadang Serang masih dapat berjalan.
3. Dalam meninjau aspek Kekuatan, Kelemahan, Peluang, dan Ancaman dalam Implementasi Kebijakan, Kelurahan Sadang Serang melakukan serangkaian upaya dalam menanggulangi segala yang menjadi penghambat dalam Implementasi Kebijakan.

Dari hasil penelitian yang dilakukan peneliti maupun kesimpulan di atas maka ada beberapa saran dalam implementasi kebijakan pengelolaan sampah dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Sadang Serang, diantaranya:

1. Bagi Kelurahan Sadang Serang

Dalam pemenuhan jumlah sumber daya manusia, Kelurahan dapat bekerjasama dengan beberapa Perguruan Tinggi maupun Lembaga Non Government untuk bekerjasama dalam perekrutan tenaga sukarelawan untuk sosialisasi dan pembinaan pada masyarakat. Pemerintah Kelurahan juga dapat juga memperluas dukungan publik dengan menjalin kerjasama yang lebih banyak dengan pihak luar maupun dunia usaha untuk membantu pelaksanaan kebijakan terkait bantuan dana, pembangunan fasilitas atau pengembangan teknologi pengelolaan sampah terbaru.

2. Bagi Masyarakat

Pihak masyarakat sebaiknya lebih meningkatkan kesadaran akan pentingnya pengolahan sampah karena manfaat yang ditimbulkan akan dinikmati kembali oleh masyarakat.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian selanjutnya dapat memperluas objek penelitian, misalnya pada Pemerintahan Kecamatan atau yang lebih tinggi lagi, dan juga dapat memaparkan variabel penelitian selain Teori Van Meter dan Van Horn.

References:

Buruan Sae. Diakses dari: (<http://www.buruansae.bandung.go.id>) pada 7 Desember 2021 pukul 14.50 WIB

Fira Nursyabani, "Mengenang 'Bandung Lautan Sampah' dari Tragedi Leuwigajah". Diakses

dari: (<https://www.google.com/amp/s/amp.ayobandung.com/read/2021/02/21/191586/mengenang-bandung->

[lautan-sampah-dari-tragedi-leuwigajah](#)). Pada 7 Maret 2021 Pukul 15.12 WIB.

Freddy, Rangkuti. 2016. Analisis SWOT Teknik Membedah Kasus Bisnis. Jakarta: Gramedia.

Mulyadi, Deddy, 2018. Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik. Bandung: CV Alfabeta.

Moleong, Lexy. J. 2016. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

Ndraha, Taliziduhu. 2010. Metodologi Ilmu Pemerintahan. Tangerang: Sirao Credentia Center.

Novianti Nurulliah, "Sadang Serang Kelurahan Percontohan di Bandung dalam Pengelolaan Sampah Berbasis Aplikasi". Diakses dari: (<https://www.pikiran-rakyat.com/bandung-raya/pr-011311252/sadang-serang-kelurahan-percontohan-di-bandung-dalam-pengelolaan-sampah-berbasis-aplikasi>). Pada 8 Maret 2021 pukul 10.35 WIB.

Sugiyono. 2017. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: CV Alfabeta.

Panduan Pelaksanaan Program Kang Pisman. Diakses dari: (<http://www.kangpisman.com>) pada 7 Desember 2021 pukul 14.45 WIB

Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Sampah.

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 45 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan

Gedung.

Undang-Undang No. 15 Tahun 2019 atas
Perubahan Undang-undang No. 12
Tahun 2011.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008
tentang Pengelolaan Sampah
(UUPS).

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014
tentang Administrasi Pemerintahan.

Undang-Undang No 32 Tahun 2004 Pasal
137 tentang Asas Pembentukan
Peraturan Daerah.

Acknowledgment (Pengakuan):

Terselesaikannya penelitian ini adalah berkat bantuan campur tangan berbagai macam pihak. Peneliti mengucapkan banyak terima kasih kepada berbagai pihak yang telah berkontribusi dalam penelitian, yaitu kepada Bapak Lutfi Budiman, Ph.D; Bapak Wilsandi Saefulloh; Drs. Wawan Setiawan; Ibu Neng Asmarani Syachbana, S.E., M.M.; Bapak Yanto Sjachriar; Bapak Endang Djumena; Ibu Novida Irawati; dan Ibu Nani Yuliani.